

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI  
KABUPATEN PULAU TALIABU**

**Riki Rikardo Dagasou**

Program Studi Administrasi Publiik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[rikirikardodagasou@gmail.com](mailto:rikirikardodagasou@gmail.com);

**ABSTRACT**

Taliabu Regency has several potential or tourist destinations that can be developed and later become superior, starting from the beauty of its beaches with white sand, coral reefs which are often found in the waters, to forests that are still natural and have not even been touched by humans. This research aims to determine the implementation of tourism policy in Taliabu Regency using Edward III's analysis which includes: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research method is descriptive qualitative. The research results show that the Taliabu Tourism Service, in communicating, especially with policy target objects, consistently uses the communication channel of invitation letters whose material is socialization and discussion. The Taliabu Tourism Office is aware of the limited regional budget for tourism. These limitations then encourage the tourism department to collaborate with the community and other parties to implement policies. The attitude of policy implementers in the field is also emphasized by the Taliabu service because it is very influential in the success of policy implementation. The research findings show that the department distributes responsibility or authority both within the Tourism Department in implementing policies and coordinating between departments related to policy implementation. This cooperation and delegation of authority aims to make policy implementation successful.

**Keywords:** *Tourism, Taliabu, Implementation, Qualitative*

**ABSTRAK**

Kabupaten Taliabu memiliki beberapa potensi atau destinasi wisata yang dapat dikembangkan dan nantinya dijadikan unggulan, mulai dari keindahan pantainya dengan pasir putih, terumbu karang banyak dijumpai di wilayah perairan, hingga hutan-hutan yang masih alami bahkan belum terjamah manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Taliabu menggunakan analisis Edward III yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas pariwisata Taliabu dalam melakukan komunikasi khususnya pada obyek sasaran kebijakan konsisten menggunakan jalur komunikasi surat undangan yang materinya adalah sosialisasi dan diskusi. Pihak Dinas Pariwisata Taliabu menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah untuk pariwisata. Keterbatasan itu yang kemudian mendorong dinas pariwisata untuk bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak-pihak lain

untuk mengimplementasikan kebijakan. Sikap dari pelaksana kebijakan saat dilapangan juga ditekankan oleh pihak dinas Taliabu karena sangat berpengaruh dalam suksesnya implementasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan pihak dinas melakukan penyebaran tanggung jawab atau wewenang baik dalam internal Dinas Pariwisata dalam menjalankan kebijakan maupun kordinasi antar sesama Dinas yang terkait dengan implementasi kebijakan. Kerjasama maupun pelimpahan wewenang tersebut bertujuan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

**Kata Kunci:** *Pariwisata, Taliabu, Implementasi, Kualitatif*

## **A. PENDAHULUAN**

Sektor Pariwisata merupakan satu diantara bidang prekonomian yang terbukti memiliki potensi besar dalam upaya pembangunan masyarakat khususnya di daerah-daerah. Potensi ini dapat berupa meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mendorong perekonomian masyarakat sekitar melalui wisatawan yang berkunjung dan melakukan transaksi ekonomi. Potensi tersebut juga meliputi adanya pendapatan bagi daerah melalui pajak ataupun retribusi.

Kabupaten Taliabu memiliki beberapa potensi atau destinasi wisata yang dapat dikembangkan dan nantinya dijadikan unggulan, mulai dari keindahan pantainya dengan pasir putih, terumbu karang banyak dijumpai di wilayah perairan, hingga hutan-hutan yang masih alami bahkan belum terjamah manusia. Potensi ini jika dikembangkan dengan baik, dapat menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Namun, hingga saat ini, sektor pariwisata Kabupaten Taliabu masih tergolong rendah pencapaiannya jika dikaitkan dengan potensi alam yang kaya tersebut. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti akses transportasi yang masih terbatas, minimnya fasilitas akomodasi yang memadai, serta kurangnya sarana penunjang lainnya, seperti pusat informasi wisata dan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Berikut data terkait potensi wisata di Kabupaten Taliabu dengan hambatan yang ada.

**Tabel 1: Nama Wisata, Lokasi dan Hambatan**

No	Nama Wisata	Lokasi	Hambatan
1	Likitobi	Desa Hobitu	Akses jalan menuju lokasi
2	Pantai Pasir Anjing	Desa air kalimat	Minim Fasilitas pendukung
3	Pulau woyo	Desa bobong	Akses jalan menuju lokasi
4	Tanjung pasturi	Desa jorjoga	Akses jalan menuju lokasi
5	Air terjun kaaba	Desa kalimat	Akses jalan menuju lokasi
6	Air hai	Desa hai	Akses jalan menuju lokasi
7	Air gela	Desa gela	Akses jalan menuju lokasi

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Talibu*

Pariwisata di daerah terpencil, seperti Taliabu, sering kali menghadapi tantangan berupa anggaran yang terbatas untuk pengembangan, minimnya

aksesibilitas menuju lokasi wisata dan masih banyak lagi. Kondisi daerah Taliabu yang berupa gugusan pulau dengan akses transportasi yang masih sangat terbatas menyebabkan daerah ini sulit dijangkau oleh wisatawan baik lokal maupun luar. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah dalam mempromosikan obyek wisata serta minimnya infrastruktur yang mendukung juga menjadi hambatan dalam pengembangan pariwisata di Taliabu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh (Narotama et al., 2024)

Data kunjungan wisatawan ke Taliabu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2: Jumlah Kunjungan Wisata Per Tahun**

Tahun	Jumlah Pengunjung	Pertumbuhan
2019	3.205	-
2020	3.510	10%
2021	1.773	- 49%
2022	3.622	104%
2023	7.999	121%

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Talibu*

Data tersebut diatas menunjukkan pertumbuhan kunjungan wisatawan cukup baik meskipun secara kuantitas atau jumlah masih jauh dari yang diharapkan atau dicanangkan. Pandemi Covid dengan pembatasan aktifitas juga sempat membuat turun tingkat kunjungan meski kemudian membaik setelah pemberlakuan *new normal* pasca covid.

Tanpa promosi yang terencana dengan baik, potensi wisata yang dimiliki oleh suatu daerah, meskipun sangat besar, akan sulit dikenal oleh calon wisatawan.

**Tabel 3: Media Promosi Wisata**

No	Nama Wisata	Promosi
1	Danau Likitobi	Media Lokal
2	Pantai Pasir Anjing	Media Lokal
3	Pulau woyo	Media Lokal
4	Air kalimat	Media lokal
5	Air hai	Media lokal
6	Air gela	Media lokal
7	Pantai pasturi	Media lokal

Sumber: *BPS Kabupaten Pulau Talibu*

Media Promosi dilakukan secara sederhana yaitu memanfaatkan media lokal, sedangkan promosi dapat ditingkatkan melalui adanya event berkala yang disinergikan dengan pelaku industri wisata seperti travel agent maupun dengan dukungan platform digital dan para influencer baik lokal maupun internasional. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu daerah adalah keterlibatan masyarakat lokal (Dewi Nurwati, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Taliabu dengan menyoroti beberapa aspek kunci, seperti kebijakan publik, regulasi, promosi, serta pembangunan infrastruktur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Taliabu.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan publik merupakan proses di mana sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan mulai dijalankan dalam lingkup nyata dan masyarakat. Tahap ini menjadi penting dan krusial mengingat meskipun kebijakan telah dicanangkan dengan baik, tanpa pelaksanaan yang tepat dan efektif, tujuan kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai. Implementasi adalah *bridge* antara pencanangan kebijakan dengan hasil yang diharapkan atau ditetapkan, dan sering kali menentukan kesuksesan atau kegagalan kebijakan itu sendiri (Sawir, 2021).

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya fokus dan bergantung pada satu atau dua pihak, tetapi melibatkan berbagai sektor-aktor, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga atau agen pelaksana, serta masyarakat luas yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Para aktor ini sedapatnya saling bekerja sama secara unik dan harmonis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat terlaksana dan diterapkan sesuai yang telah ditetapkan.

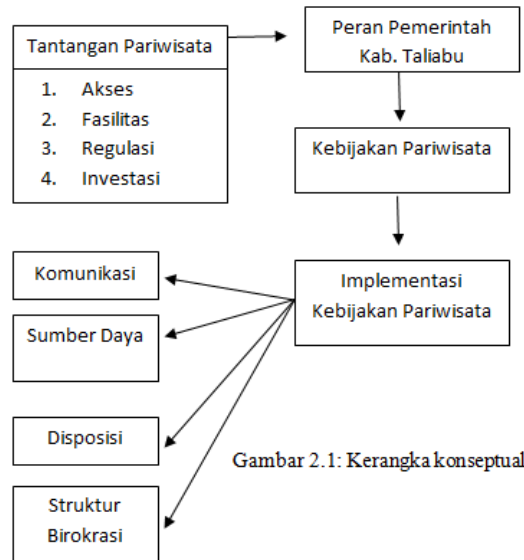
### **Model Implementasi Edward III**

Terdapat beberapa rumusan implementasi kebijakan salah satu diantaranya yang di rumuskan atau dimodelkan oleh Edward III. Model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edwards III (Anggara, 2018, p. 249) menyoroti 4 variabel atau aspek utama yang dapat mempengaruhi efektivitas proses implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek atau variabel ini saling terkait dan menjadi penentu signifikan apakah kebijakan yang telah ditetapkan mampu dilaksanakan dengan baik. Edward III juga mempertanyakan prakondisi apa yang semestinya ada-tersedia agar implementasi tersebut lancar dan faktor apa saja yang kemudian teridentifikasi dapat menjadi hambatan atau kendala utama dari kesuksesan itu sendiri (Anggara, 2018) Dalam banyak hal implementasi, kegagalan kebijakan sering kali bukan karena kebijakan itu sendiri, melainkan terdapat masalah dalam berjalannya implementasi, yang mencakup adanya kendala dalam komunikasi, minimnya sumber daya, sikap dari pelaksana yang tidak mendukung dan cenderung kontra produktif, serta struktur birokrasi yang rumit.

### **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konsep tersebut diatas, penulis melakukan penelitian dengan berfokus pada implementasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten taliabu. Implementasi tersebut dinilai melalui sudut pandang teori implementasi Edward III dimana suatu implementasi diuji dengan komunikasi yang dilakukan, sumber daya yang digunakan, disposisi ditetapkan

dan struktur birokrasi yang dilibatkan didalamnya dengan harapan dapat mengetahui setiap tahapan dari implementasi tersebut.



Gambar 2.1: Kerangka konseptual

### Gambar 1: Kerangka Konseptual

Sumber: *Diolah oleh Penulis*

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan budaya dari perspektif individu atau kelompok yang terlibat. Menurut Bogdan & Biklen Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Datayang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Dawis et al., 2023) penelitian kualitatif memberikan wawasan mendalam mengenai makna dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, sehingga cocok untuk memahami dinamika peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis: Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Taliabu melalui analisis model Edwar III yang meliputi aspek: - Sumber Daya; - Komunikasi; - Disposisi; dan - Struktur Birokrasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dengan pihak yang menjadi sampel wawancara adalah: Pegawai Dinas pariwisata di Kabupaten Taliabu; Pengelola tempat wisata di Kabupaten Taliabu; dan Masyarakat sekitar tempat wisata di Kabupaten Taliabu,

Menurut Miles & Huberman (Zulfirman, 2022), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan: Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.





**Gambar 3: Rakit Wisata**

**Sumber:** Dinas Pariwisata Kabupaten Taliabu



**Gambar 4: Dermaga Wisata**

**Sumber:** Dinas Pariwisata Kabupaten Taliabu

Dengan adanya dermaga tersebut diatas Dinas Pariwisata Kabupaten Taliabu berharap wisatawan dapat menikmati spot pemandangan sampai ke tengah Likitobi untuk aktifitas swafoto maupun untuk pemancingan.

Penulis telah melakukan serangkaian wawancara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Taliabu dan beberapa pihak masyarakat untuk mengetahui implementasi kebijakan pariwisata yang telah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Edward III yaitu adanya aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam menilai suatu implementasi. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan.

#### **Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan.

*“Setiap kebijakan yang dilaksanakan kami selalu mengkomunikasikannya pada pihak-pihak yang terkait. Contoh pada waktu penataan pedagang di wilayah pantai, kami undang semua pedagangnya dan kami diskusikan cara yang paling baik dalam*

*penataan agar tujuan kebijakan diterima dengan baik.” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Hasil wawancara ini menurut penulis dapat disimpulkan bahwa usaha untuk mengkomunikasikan kebijakan yang dilaksanakan telah dilakukan oleh pihak dinas dengan harapan tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan seperti keresahan akibat *miss* informasi maupun penolakan karena merasa dirugikan. Peneliti juga menanyakan terkait apakah ada panduan tertulis bagi pihak-pihak terkait dengan adanya pelaksanaan suatu kebijakan.

*“Ya, kami memiliki panduan atas kebijakan yang akan dilaksanakan, hanya saja berupa edaran yang dibagikan sebelum undangan untuk diskusi suatu kebijakan” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Peneliti juga menanyakan hal yang sama pada informan terkait informasi suatu kebijakan yang berkaitan dengan aktifitas informan dalam hal ini terkait informasi adanya pelaksanaan kebijakan.

*“Saya diberi tahu oleh kepala desa bahwa nantinya akan ada pengarahan dan informasi dari dinas pariwisata, saya diberi edaran dan diminta hadir dipertemuan” (Wawancara dengan Informan 16-12-2024)*

Temuan ini dapat diartikan pihak dinas secara pro-aktif mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan dan berdampak pada pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Hal ini menjadi penting mengingat komunikasi pada pihak terkait adalah kunci atas kesuksesan implementasi kebijakan.

### **Sumber Daya**

Meski konteks dalam kebijakan sudah dikomunikasikan secara baik, jelas serta konsisten, tetapi jika pelaksana atau implementor kekurangan sumberdaya guna untuk melaksanakan dan mengimplementasi tidak akan berjalan kreatif.

*“Sumber daya kami masih terbatas, terutama di bidang pariwisata yang memerlukan keahlian khusus. Kita pernah mau menerapkan wisata dengan konsep berkelanjutan, nyatanya terdapat serangkaian mutu yang harus dipenuhi termasuk sumber daya yang sesuai, jadi hambatannya disana” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Temuan ini menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata mengingat sumber daya khususnya ahli dalam bidang pariwisata masih sangat kurang di Kabupaten Taliabu.

Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pariwisata juga terjadi pada sumber daya keuangan, disatu sisi pengembangan pariwisata memerlukan keuangan atau modal yang cukup besar yang tanpa hal itu maka suatu kebijakan akan sangat sulit terimplementasikan.

*“Ya, kami bekerja sama dengan LSM dan pihak swasta untuk mengembangkan wisata baik dalam teknis pengelolaan bersama maupun pengembangan potensi. Contohnya di wisata Liki Tobi kita libatkan masyarakat dalam membangun fasilitas penunjang agar wisata menjadi menarik dan mereka juga mendapat penghasilan*



*mengingat mereka juga berdagang di sana”* (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)

Pada pihak lain, informan penelitian di Kabupaten Pulau Taliabu juga menyatakan terkait hal ini:

*“Masyarakat membantu melalui kerja bakti membangun fasilitas sederhana di lokasi wisata. Ada juga yang membantu keamanan parkir maupun juru mudi perahu karena kami juga bisa dapat penghasilan”* (Wawancara dengan Informan di Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)

Keterbatasan sumber daya keuangan tersebut membuat pihak Dinas dalam implementasi kebijakan bekerjasama dengan pihak diluar dinas agar kebijakan tetap dapat terlaksana. Meski hal tersebut tidak benar-benar mampu menutupi kekurangan yang ada.

*“Kami akhirnya memprioritaskan wilayah yang potensinya lebih tinggi untuk pengembangan khususnya pada tahap awal”* (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)

Pernyataan tersebut adalah pilihan terbaik buat Dinas mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas apalagi keadaan masyarakat di kabupaten Taliabu masih sangat kurang dalam perekonomian dan pendidikan sehingga anggaran pemerintah banyak yang terserap untuk hal-hal tersebut.

### **Disposisi**

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi efektif. Pada implementasi kebijakan wisata di Kabupaten Taliabu disposisi dapat dilihat dari temuan berikut:

*“Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam pengembangan dan pengelolaan wisata setempat. Hal ini juga dapat dilihat dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017-2026. Memang terdapat hambatan dalam anggaran namun kami terus upayakan. Pemberian rakit wisata di Liki Tobi dan Pembangunan Dermaga wisata adalah bukti kongkrit dari implementasi kebijakan wisata yang kami canangkan”* (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)

Pernyataan tersebut kembali menunjukkan hambatan utama dalam implementasi kebijakan adalah anggaran yang terbatas. Meski tetap dijalankan dengan beberapa penyesuaian. Kompetensi pelaksana juga menjadi hal yang patut dilihat dalam aspek disposisi.

*“Kami menugaskan anggota atau tim yang memiliki kemampuan meski terbatas ya. Usaha untuk meningkatkan kompetensi dari pihak kami khususnya pada saat implementasi tetap dilakukan baik dengan mendatangkan ahli dalam pelatihan maupun kami study keluar daerah untuk melihat langsung bagaimana daerah lain yang sukses*

*dalam implementasi terkait wisata dan industrinya” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Dari pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak dinas menyadari kekurangan atas kompetensi yang relevan namun tetap berusaha untuk meningkatkan hal tersebut. Kompetensi ini juga mencakup kemampuan pelaksana dalam berinteraksi dengan pihak-pihak luar Dinas khususnya masyarakat setempat yang berada di lokasi wisata. Kemampuan ini juga menyertakan kemampuan memberi pemahaman pentingnya kesuksesan suatu kebijakan.

*“Tim pelaksana kebijakan sebelum melaksanakan kebijakan harus memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Contoh penataan pedagang di wilayah lokasi. Tim harus memahami bahwa hal ini penting sebagai bagian dari kebersihan dan kenyamanan bagi wisatawan dan dampaknya bagi keinginan untuk berkunjung kembali. Nah, ini kan tim harus paham sebelum nantinya mereka memahami pada para pedagang. Kalau tim aja kurang memahami ya sulit berhadapan dengan pedagang kalau menolak” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Penulis juga menanyakan hal serupa pada informan, berikut pernyataan dari informan.

*“Orang-orang Dinas itu ya sering ngajak kami bahas kedepannya wisata ini akan dibangun ini itu ya pokoknya demi berkembangnya wisata daerah kami” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan aspek disposisi pihak dinas telah tepat dalam implementasi suatu kebijakan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP

*“Dalam pelaksanaan, kami memiliki aturan yang jelas. Mulai dari tahap sosialisasi, dengar pendapat sampai pada musyawarah jika memang ada beberapa pihak yang merasa keberatan. Dan setelah pelaksanaan pun kami menyediakan tempat dan waktu jika memang masih ada permasalahan terkait kebijakan yang telah dijalankan.” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa pihak Dinas memiliki prosedur yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai penguat atas SOP tersebut, Dinas Pariwisata berinovasi dengan mengeluarkan aplikasi SiWasi

Persoalan birokrasi dalam implementasi kebijakan juga terkait dengan wilayah tanggung jawab antar Dinas yang juga memiliki dinamikanya sendiri. Penulis menanyakan hal ini dengan temuan sebagai berikut:

*“Ya kan kebijakan wisata ini wilayahnya selalu bersinggungan dengan hutan maupun laut, belum lagi terkait dampak wisata pada lingkungan hidup. Jadi memang kami sering berkonsultasi dan*

*meminta persetujuan dari Dinas lain, contoh yang kemaren pembuatan dermaga wisata, itukan kami tetap menyampaikan pada dinas perhubungan bahwa itu bukan dermaga kapal yang mengharuskan izin khusus, itu hanya fasilitas penunjang agar obyek wisata menjadi lebih bagus spot pemandangannya” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Peneliti juga mendapatkan temuan terkait hambatan struktur birokrasi dalam suatu implementasi dari informan

*“Ketika ada pengerjaan rakit untuk wisata pantai, lahan saya tiba-tiba dipakai tanpa izin untuk tempat pembuatan. Memang pada akhirnya selesai dengan baik, tapi awalnya saya dilempar ke beberapa orang di Dinas mengenai masalah itu. Harusnya kan langsung satu orang gitu sudah cukup” (Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Taliabu 16-12-2024)*

Temuan itu menunjukkan adanya ketidakjelasan awal bagi masyarakat saat terjadi perselisihan meski pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

### **Pembahasan**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transisi kebijakan dikomunikasikan kepada sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat sekitar destinasi wisata dilakukan melalui edaran sosialisasi dan undangan pihak Dinas Pariwisata Taliabu kepada pihak-pihak tersebut untuk melakukan diskusi terkait kebijakan yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh George C. Edward III (Kurniati et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dinas pariwisata Taliabu dalam implementasi kebijakan selalu menyertakan program sosialisasi dan diskusi berulang kali dengan harapan maksud dan tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Dinas pariwisata Taliabu dalam melakukan komunikasi khususnya pada obyek sasaran kebijakan konsisten menggunakan jalur komunikasi surat undangan yang materinya adalah sosialisasi dan diskusi. Pilihan ini diambil mengingat model komunikasi digital belum terlalu bisa menyentuh sasaran obyek kebijakan. Hal ini sesuai dengan argument George C. Edward III (Anggara, 2018) bahwa jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan.

Sumber daya manusia adalah salah satu dari kebutuhan tersebut. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi Dinas Pariwisata Taliabu, minimnya sumber daya manusia yang spesifik menguasai dinamika pengelolaan pariwisata membuat adanya keterbatasan personil dalam implementasi. Pihak dinas sudah menyampaikan keterbatasan ini pada pimpinan maupun Bupati, namun karena kendala anggaran yang terbatas maka usaha untuk menyiapkan sumber daya unggul yang khusus pariwisata masih belum menemukan solusi kongkritnya.

Sumber daya keuangan juga merupakan hal yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan (Sawir, 2021). Sumber daya keuangan berfungsi dalam menyediakan modal bagi pemerintah untuk memetakan, merencanakan dan melaksanakan pengembangan potensi wisata termasuk implementasi dari kebijakan pariwisata itu sendiri. Pihak Dinas Pariwisata Taliabu menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah untuk pariwisata. Keterbatasan itu yang kemudian mendorong dinas pariwisata untuk bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak-pihak lain untuk mengimplementasikan kebijakan. Sebagaimana diketahui dalam hasil penelitian, pihak dinas pariwisata bekerja sama dengan masyarakat dalam membuat perahu rakit wisata di pantai likitobi yang tujuannya untuk menjadi wahana spot laut bagi wisatawan. Begitupun dermaga wisata yang mana pemerintah dibantu masyarakat yang bahu membahu untuk membangun dermaga wisata mengingat jika destinasi wisata ramai masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan melalui penjualan makanan dan minuman bagi wisatawan. Sumber daya keuangan ini memang salah satu kunci keberhasilan implementasi sebagaimana dinyatakan oleh Edward III (Indah et al., 2024) dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana dinyatakan oleh Edward III (Anggara, 2018) Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staff atau pegawai yang kurang memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Selain itu informasi, dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu, pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Pada aspek ini, pihak dinas Pariwisata Taliabu berkomitmen dalam mensukseskan kebijakan yang telah dicanangkan dalam rencana induk pariwisata Taliabu meski ada beberapa hambatan khususnya dalam hal anggaran. Komitmen ini dipenuhi dalam penunjukkan staff yang memiliki komitmen dan kompetensi yang sesuai kebijakan yang dilaksanakan. Usaha untuk terus meningkatkan kompetensi pelaksana juga terus diupayakan melalui serangkaian pelatihan yang diberikan oleh tenaga ahli agar pelaksana kebijakan semakin mendekati posisi ideal dan dapat mensukseskan kebijakan pemerintah dalam hal ini pengelolaan pariwisata.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (Sawir, 2021). Struktur organisasi sendiri merupakan aspek yang melingkupi bagaimana mekanisme standart layanan diberikan dan fragmentasinya. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Standart Operasi juga harus memiliki kejelasan, detail, rinci, dan memiliki keteraturan dalam setiap operasinya agar SOP tersebut ideal dalam pelaksanaan suatu kebijakan (Elvan & Hasin, 2023)

Dalam aspek struktur birokrasi ini pihak dinas Pariwisata Taliabu memiliki aturan-aturan atau standart operation procedur (SOP) yang jelas. Mulai dari tahap sosialisasi awal kebijakan, dengar pendapat pada perencanaan sampai pada musyawarah berjalan pada saat kebijakan di implementasikan untuk mewadahi kritik dan saran masyarakat.

Pemberian wewenang dan *fragmentasi* juga berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan, Sebagaimana dinyatakan oleh Edward III (Indah et al., 2024) fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Sebagaimana dinyatakan oleh (Indah et al., 2024) kurangnya koordinasi antar lembaga, serta praktik-praktik korupsi dapat menghambat proses implementasi kebijakan.

Temuan penelitian menunjukkan pihak dinas melakukan penyebaran tanggung jawab atau wewenang baik dalam internal Dinas Pariwisata dalam menjalankan kebijakan maupun kordinasi antar sesama Dinas yang terkait dengan implementasi kebijakan. Kerjasama maupun pelimpahan wewenang tersebut bertujuan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. Kerjasama antar dinas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Taliabu juga dapat dilihat dalam pembuatan dermaga wisata yang memerlukan izin khusus dari Dinas Perhubungan meski dermaga ini bukan digunakan untuk penyandaran kapal. Begitu juga dalam penataan pedagang diwilayah wisata, Pihak Dinas pariwisata juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa sebagai pemangku kebijakan setempat. Hal ini tepat sebagaimana dinyatakan oleh Arafat bahwa implementasi yang baik membutuhkan suatu kordinasi atas dinas atau lembaga terkait maupun antar sektor dinas untuk menghindari potens tumpang tindih kebijakan dan wewenang itu sendiri (Arafat, 2023) yang dapat dimaknai adanya kejelasan tanggung jawab yang diemban masing-masing pemangku kebijakan dan pelaksana. Pembuatan aplikasi SiWasit dalam layanan kepariwisataan dan badan Tourism Information Center adalah bentuk kongkrit dari komitmen pemerintah taliabu untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas birokrasi dalam implementasi kebijakan.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan penelitian implementasi kebijakan pariwisata Kabupaten Taliabu ditinjau dari teori Edward III:

### **Komunikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transisi kebijakan dikomunikasikan kepada sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat sekitar

destinasi wisata dilakukan melalui edaran sosialisasi dan undangan pihak Dinas Pariwisata Taliabu kepada pihak-pihak tersebut untuk melakukan diskusi terkait kebijakan yang dilaksanakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak dinas pariwisata Taliabu dalam implementasi kebijakan selalu menyertakan program sosialisasi dan diskusi berulang kali dengan harapan maksud dan tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik. Dinas pariwisata Taliabu dalam melakukan komunikasi khususnya pada obyek sasaran kebijakan konsisten menggunakan jalur komunikasi surat undangan yang materinya adalah sosialisasi dan diskusi. Hambatan utama dalam proses komunikasi hampir tidak ada hanya saja masyarakat sebagai sasaran kebijakan berharap pihak Dinas Pariwisata lebih intens dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

### **Sumber Daya**

Minimnya sumber daya manusia yang spesifik menguasai dinamika pengelolaan pariwisata membuat adanya keterbatasan personil dalam implementasi. Pihak dinas sudah menyampaikan keterbatasan ini pada pimpinan maupun Bupati, namun karena kendala anggaran yang terbatas maka usaha untuk menyiapkan sumber daya unggul yang khusus pariwisata masih belum menemukan solusi kongkritnya. Sumber daya keuangan juga merupakan hal yang memiliki keterkaitan dengan implementasi kebijakan. Pihak Dinas Pariwisata Taliabu menyadari adanya keterbatasan anggaran daerah untuk pariwisata. Keterbatasan itu yang kemudian mendorong dinas pariwisata untuk bekerja sama dengan masyarakat maupun pihak-pihak lain untuk mengimplementasikan kebijakan.

### **Disposisi**

Pada aspek ini, pihak dinas Pariwisata Taliabu berkomitmen dalam mensukseskan kebijakan yang telah dicanangkan dalam rencana induk pariwisata Taliabu meski ada beberapa hambatan khususnya dalam hal anggaran. Komitmen ini dipenuhi dalam penunjukkan staff yang memiliki komitmen dan kompetensi yang sesuai kebijakan yang dilaksanakan. Usaha untuk terus meningkatkan kompetensi pelaksana juga terus diupayakan melalui serangkaian pelatihan yang diberikan oleh tenaga ahli agar pelaksana kebijakan semakin mendekati posisi ideal dan dapat mensukseskan kebijakan pemerintah dalam hal ini pengelolaan pariwisata. Sikap dari pelaksana kebijakan saat dilapangan juga ditekankan oleh pihak dinas Taliabu karena sangat berpengaruh dalam suksesnya implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

### **Struktur Birokrasi**

Dalam aspek struktur birokrasi ini pihak dinas Pariwisata Taliabu *kami* memiliki aturan-aturan atau *SOP* yang jelas. Mulai dari tahap sosialisasi awal kebijakan, dengar pendapat pada perencanaan sampai pada musyawarah berjalan pada saat kebijakan di implementasikan untuk mewadahi kritik dan saran masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan pihak dinas melakukan penyebaran tanggung jawab atau wewenang baik dalam internal Dinas Pariwisata dalam menjalankan kebijakan maupun kordinasi antar sesama Dinas yang terkait dengan implementasi kebijakan. Kerjasama maupun pelimpahan wewenang tersebut

bertujuan untuk mensukseskan implementasi kebijakan. Hambatan pada aspek ini adalah adanya kebijakan yang seringkali melingkupi beberapa dinas terkait sehingga ada beberapa alur yang sedikit rumit, termasuk jika ada aduan masyarakat terkait kebijakan yang dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut saran yang dapat peneliti ajukan pada pihak dinas pariwisata: Komunikasi dapat diefisiensikan dengan menggunakan digital seperti grup whatsapp; Sumber daya manusia maupun anggaran yang kurang banyak jumlahnya dapat dikerjasamakan dengan pihak lembaga swadaya masyarakat maupun swasta untuk membantu kekurangan tersebut melalui program pengelolaan bersama; Kordinasi dengan instansi lain dapat dilakukan secara berkala agar saat ada implementasi kebijakan, kesepahaman antar dinas sudah terbentuk.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik* (Vol. 19, Issue 5).
- Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., & Baali, Y. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Dewi Nurwati, A. S. M. dan E. S. (2020). Analisis Jejaring Pelaku Pariwisata Di Kabupaten Bintan : Studi Pada Event Ironman Bintan. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*, 1(1), 62–169.
- Elvan, S., & Hasin, A. (2023). Pengaruh Standard Operating Procedure dan Safety Management terhadap Kualitas Layanan pada Wisata Jeep Lava Tour Merapi di Sleman. *Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 02(01), 268–281.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Hasanah, Sari, F. H., Fatiha, E. S., & Basron. (2024). *TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR*. 7(September).
- Kurniati, P. S., Gislawati, R. T., Safitri, F. N., & Lutpi, A. J. (2023). Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 875–886.
- Narotama, M. R., Saduddin, S., & Furjatullah, S. A. (2024). Strategi Mengatasi Aksesibilitas Destinasi Pulau Kecil Dengan Penyesuaian Segmentasi Wisatawan Kepulauan Riau. *Tourisma: Jurnal Pariwisata*, 5(1), 56. <https://doi.org/10.22146/gamajts.v5i1.90293>
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>